



Penguatan Tata Kelola Koperasi Berbasis Pendampingan di Kabupaten Sukabumi: Integrasi Manajemen Ekuitas, Aset, dan Akuntansi

Agus Sobar¹ & Wawan Ruswandi²

¹ Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, 43142 Telp:081563355168

E-mail: agussobar2@gmail.com

² Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi Hp. 085720090591

E-mail: wawan.mini75@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-04-11

Revised : 2025-05-09

Accepted: 2025-05-13

KEYWORD

Cooperative Management,

Cooperative Equity Management,

Cooperative Governance

KATA KUNCI

Manajemen Koperasi,

Manajemen Ekuitas Koperasi,

Tata Kelola Koperasi

ABSTRACT

Cooperatives, as business entities that aim to improve the welfare of their members, require good and accountable governance. This community service activity aims to strengthen cooperative governance through the implementation of accounting policies, debt management, and asset management effectively and transparently, as part of a program to strengthen modern and competitive cooperative institutions. The activity was carried out on February 26, 2025, at the Augusta Cicantayan Hotel, Sukabumi Regency, in collaboration with the Sukabumi Regency Cooperative and SME Service as a partner. A total of 25 participants attended, consisting of cooperative administrators, academics, and related service employees. The method used is Participatory Action Research through interactive workshops and mentoring. Field verification to explore real cooperative problems and encourage transparency, accountability, and organizational sustainability. Data analysis is carried out thematically with triangulation of sources and methods to ensure valid and in-depth results. This activity is special because it not only discusses the basic theory of cooperative governance, but also provides a practical approach to managing finances, assets, and accounting records that are rarely discussed in other cooperative training. Collaboration between academics and local governments makes this activity more applicable. As a result, participants understand the material, can prepare simple financial reports, and formulate more structured cooperative policies. This activity provides a real contribution to strengthening modern and accountable cooperative governance.

ABSTRAK

Koperasi sebagai badan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya memerlukan tata kelola yang baik dan akuntabel. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat tata kelola koperasi melalui penerapan kebijakan akuntansi, pengelolaan utang, dan manajemen aset secara efektif dan transparan, sebagai bagian dari program penguatan kelembagaan koperasi modern dan kompetitif. Kegiatan dilaksanakan pada 26 Februari 2025 di Hotel Augusta Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, bekerja sama dengan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sukabumi sebagai mitra. Sebanyak 25 peserta hadir, terdiri dari pengurus koperasi, akademisi, dan pegawai dinas terkait. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* melalui workshop interaktif dan pendampingan. Verifikasi lapangan untuk menggali permasalahan nyata koperasi dan mendorong transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan organisasi. Analisis data dilakukan secara tematik dengan triangulasi sumber

dan metode untuk memastikan hasil yang valid dan mendalam. Kegiatan ini istimewa karena tidak hanya membahas teori dasar tata kelola koperasi, tetapi juga memberikan pendekatan praktis dalam mengelola keuangan, aset, dan pencatatan akuntansi yang jarang dibahas dalam pelatihan koperasi lainnya. Kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah menjadikan kegiatan ini lebih aplikatif. Hasilnya, peserta memahami materi, mampu menyusun laporan keuangan sederhana, dan merumuskan kebijakan koperasi yang lebih tertata. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola koperasi yang modern dan akuntabel.

1. Pendahuluan

Koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang berakar pada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Dalam konteks pembangunan nasional, koperasi disebut sebagai *soko guru perekonomian* karena perannya dalam memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah. Secara teoretis, koperasi memiliki fungsi strategis dalam redistribusi sumber daya ekonomi dan peningkatan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip-prinsip demokratis dan partisipatif (ICA, 2020). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak koperasi belum mampu berfungsi secara optimal karena lemahnya tata kelola kelembagaan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan teknologi informasi, serta belum optimalnya daya saing koperasi dalam menghadapi pasar yang semakin terbuka dan kompetitif (Ruswandi et al., 2021).

Situasi ini juga terjadi di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi, di mana masih banyak koperasi yang memerlukan penguatan kelembagaan untuk dapat bertransformasi menjadi koperasi modern dan profesional. Hal ini menjadi perhatian pemerintah, sebagaimana ditekankan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI yang mendorong transformasi koperasi melalui tata kelola berbasis teknologi dan prinsip *Good Cooperative Governance* sebagai strategi menuju koperasi modern (Fadhillah, 2025). Namun demikian, *gap pengabdian* yang muncul adalah minimnya intervensi langsung berbasis kebutuhan nyata koperasi yang menggabungkan pendekatan partisipatif dengan pendampingan kelembagaan secara sistematis dan kontekstual. Banyak program peningkatan kapasitas koperasi masih bersifat normatif dan belum menyentuh perbaikan struktural dalam aspek manajerial dan keuangan.

Menjawab permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan kontribusi nyata dalam proses transformasi koperasi di Sukabumi melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini memungkinkan partisipasi aktif dari

pengurus koperasi dalam proses identifikasi masalah, pembelajaran, hingga pengambilan keputusan. Kegiatan dikemas dalam bentuk workshop dan pendampingan intensif yang difokuskan pada tiga area strategis tata kelola, yaitu: penerapan kebijakan akuntansi, manajemen utang, dan manajemen aset. Fokus ini dipilih karena pengelolaan keuangan merupakan salah satu titik lemah koperasi yang berdampak langsung pada kredibilitas dan keberlanjutan lembaga.

Verifikasi lapangan dilakukan sebagai upaya untuk menyesuaikan materi dan intervensi dengan kondisi aktual koperasi, sekaligus membangun sistem transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat. Kegiatan ini juga dirancang sebagai ruang kolaborasi dan pertukaran pengalaman antar koperasi, untuk membangun ekosistem koperasi yang saling menguatkan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pengurus koperasi secara teknis dan manajerial, tetapi juga mendorong terciptanya koperasi yang adaptif, profesional, dan berdaya saing di era ekonomi digital.

2. Tinjauan Literatur

a. Manajemen Koperasi

Manajemen koperasi dapat dipahami sebagai suatu bentuk hubungan yang terstruktur dan efektif antara individu maupun organisasi yang bersifat relatif independen, yang bekerja sama secara sinergis dengan tujuan utama meningkatkan daya saing masing-masing pihak (Sudarso et al., 2021). Implementasi manajemen koperasi menuntut peran aktif anggota dalam berbagai aspek, termasuk pengambilan keputusan, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan koperasi demi mendukung kemajuan dan kesejahteraan bersama.

(Sudarso et al., 2021) mengidentifikasi tiga aspek utama anggota koperasi, yaitu: (1) anggota berperan aktif dalam menyumbangkan atau menggerakkan sumber daya yang dimilikinya; (2) anggota terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan

koperasi; dan (3) anggota turut menikmati hasil atau keuntungan dari jalannya koperasi. Dalam kerangka tersebut, anggota koperasi menempati posisi strategis sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Selain memiliki hak, anggota koperasi juga memikul kewajiban yang meliputi: mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, mematuhi keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota dan berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi serta mengembangkan dan memelihara kebersamaan antar anggota koperasi (Yewang, 2022).

b. Manajemen Ekuitas Koperasi

Manajemen ekuitas dalam konteks koperasi merujuk pada upaya pengaturan dan pengelolaan modal organisasi secara optimal agar mampu menekan biaya, meningkatkan keuntungan, serta memaksimalkan pemanfaatan modal untuk menambah kekayaan organisasi. Selain itu, pengelolaan ekuitas juga mencakup pengendalian risiko agar organisasi dapat mengantisipasi potensi kerugian dan mengambil langkah pencegahan sebelum risiko tersebut terjadi. (A. Syafira, 2020). Modal koperasi memiliki peranan krusial sebagai fondasi pembiayaan aktivitas usaha, yang berdampak langsung terhadap kapasitas operasional dan ekspansi koperasi.

Modal koperasi umumnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu modal dasar, modal sendiri, dan modal pinjaman. Modal dasar merupakan kapital awal pendirian koperasi. Modal sendiri bersumber dari simpanan anggota, baik simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, maupun simpanan lainnya, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan berkelanjutan. Sebaliknya, modal pinjaman berasal dari entitas eksternal seperti lembaga keuangan atau koperasi lain, dan penggunaannya terikat pada kewajiban pengembalian sesuai perjanjian.

Menurut (Elya Dasuki, 2023), komponen ekuitas koperasi mencakup:

- 1) Simpanan pokok adalah sejumlah uang dengan jumlah yang sama bagi setiap anggota, yang harus dibayarkan saat pertama kali bergabung sebagai anggota koperasi.
- 2) Simpanan Wajib adalah simpanan yang harus dibayar oleh anggota koperasi dalam jumlah yang sama pada setiap periode tertentu, misalnya setiap bulan.
- 3) Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang tidak dibagikan kepada anggota, tetapi disimpan sesuai ketentuan anggaran dasar atau hasil keputusan rapat anggota. Dana

cadangan ini digunakan untuk pengembangan usaha koperasi atau menutupi kerugian jika koperasi mengalami kerugian.

- 4) Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah keuntungan koperasi yang didapat dari hasil kegiatan usaha dengan anggota dan, jika ada, dengan non-anggota, setelah dikurangi biaya operasional dan biaya lainnya dalam satu periode.
- 5) Modal Sumbangan adalah uang atau barang yang diberikan oleh pihak lain sebagai hibah atau bantuan yang tidak mengikat. Modal ini tidak boleh dibagikan kepada anggota selama koperasi masih aktif atau belum dibubarkan.
- 6) Modal Penyetaraan adalah kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib yang dibayar oleh anggota baru melebihi jumlah yang dibayarkan oleh anggota pendiri. Hal ini dilakukan agar ada kesetaraan, dan besarnya disesuaikan dengan tingkat kinerja koperasi saat anggota baru bergabung.

c. Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

Dalam konsep *good corporate governance* pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pengelolaan organisasi yang bertujuan menciptakan tata kelola yang baik. Dalam koperasi, penerapan tata kelola yang baik berarti menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan manajemen koperasi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, yang berlaku secara umum di berbagai organisasi, koperasi diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan, terutama anggotanya (Setiawan & Pangestu, 2021).

Tujuan utama tata kelola adalah menciptakan nilai tambah, menekan potensi risiko, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Tata kelola yang efektif menjadi fondasi penting untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan (Idrus et al., 2024)

(Budiyono & Indah, 2018) menekankan bahwa tata kelola koperasi yang ideal harus memenuhi sejumlah prasyarat kelembagaan, seperti: (1) Koperasi memiliki status badan hukum; (2) Memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART); (3) Memiliki struktur organisasi yang jelas, yaitu pengawas, pengurus, dan anggota; (4) Memiliki visi, misi, serta tujuan yang terarah; (5) Memiliki target yang ingin dicapai; (6) Menjalankan ketentuan hukum yang berlaku, seperti UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Permenkop No. 20 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Koperasi, dan

Permenkop No. 15 Tahun 2015 tentang Standar Pelaporan Keuangan Simpan Pinjam; (7) Memiliki pedoman tata kelola koperasi melalui kebijakan internal, seperti kebijakan mutu dan sasaran mutu; (8) Memiliki pembagian tugas (*job description*) yang jelas pada setiap bagian; (9) Memiliki pedoman *best practices*; (10) Memiliki SOP dan SOM yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi melalui dinas terkait; (11) Memiliki motto sebagai bagian dari budaya koperasi; (12) Memiliki tenaga kerja tetap yang digaji penuh waktu; (13) Menjaga koordinasi yang baik antara seluruh organ koperasi melalui rapat anggota, pengurus, dan pengawas secara berkala, demi mendukung kemajuan koperasi dan kesejahteraan anggotanya.

Dengan struktur dan sistem yang baik, koperasi memiliki peluang lebih besar dalam mewujudkan tujuannya secara profesional dan berkelanjutan.

3. Metode

Kegiatan Pengabdian ini mengadaptasi kerangka kerja *Participatory Action Research* (PAR) (Chevalier & Buckles, 2019) dalam (Deni & Ruswandi, 2025) yang menekankan pada Proses yang mengedepankan keterlibatan langsung komunitas dan pemangku kepentingan dalam menganalisis masalah dan merumuskan solusi secara kolaboratif. Dalam konteks ini, data dikumpulkan melalui observasi langsung saat kegiatan workshop dan pendampingan berlangsung, diskusi, serta umpan balik peserta yang direkam dalam bentuk catatan lapangan dan lembar evaluasi.

Adapun untuk Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan tematik, yakni mengelompokkan dan menafsirkan data berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari hasil diskusi dan tanggapan peserta. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik, hambatan, serta peluang dalam tata kelola kelembagaan koperasi di Kabupaten Sukabumi. Hasil analisis ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut program pendampingan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2025 di Hotel Augusta Jl. Raya Cikukulu No. 72 Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pada kegiatan Workshop dan Pendampingan tentang Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi agar lebih profesional dan berdaya saing. Diikuti oleh Pengurus atau pengelola koperasi yang berwilayah di Kabupaten Sukabumi dengan jumlah sebanyak 25 orang dan kriteria koperasi yang ikut serta adalah koperasi yang aktif melakukan RAT. Pelaksanaan kegiatan

menggunakan metode komprehensif yang meliputi: penyampaian materi pokok, diskusi terpandu, serta interaksi langsung untuk memastikan transfer pengetahuan yang optimal.

Adapun tahapan Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat in, bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Tahapan Pelaksanaan PKM

Tahap	Kegiatan	Hari, Tanggal	Durasi
1. Persiapan	- Penyelarasan program kegiatan dengan arah kebijakan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sukabumi	Senin, 17 Februari 2025	1 hari
	- Penentuan mekanisme, agenda, dan materi	Selasa, 18 Februari 2025	1 hari
	- Identifikasi peserta dan kebutuhan pelatihan	Rabu, 19 Februari 2025	1 hari
2. Pelaksanaan	- Koordinasi teknis lokasi, logistik, dan narasumber	Rabu, 26 Februari 2025	1 hari (08.00–16.00 WIB)
	- Pembukaan dan pemaparan materi utama oleh Kepala Dinas Koperasi UKM	Rabu, 26 Februari 2025	1 hari (08.00–16.00 WIB)
3. Monitoring dan Evaluasi	- Workshop dan diskusi interaktif	Rabu, 26 Februari 2025	1
	- Dialog kebijakan dengan peserta	Rabu, 26 Februari 2025	1
	- Observasi selama kegiatan berlangsung	Rabu, 26 Februari 2025	1
	- Penilaian respons peserta melalui lembar evaluasi		
	- Identifikasi tindak lanjut pendampingan		

4. Hasil

a. Gambaran Umum

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Sukabumi merupakan mitra strategis dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki mandat dalam pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan koperasi di tingkat daerah, Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran krusial dalam memastikan keberlangsungan dan kualitas tata kelola koperasi. Keterlibatan dinas ini memungkinkan kegiatan PKM menjangkau koperasi-koperasi yang membutuhkan pendampingan secara tepat sasaran, sehingga program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang nyata dan terukur.

Fokus kegiatan PKM diarahkan pada penguatan tata kelola kelembagaan koperasi, dengan penekanan pada dua aspek utama. Pertama, penyelarasan struktur dan mekanisme kelembagaan koperasi dengan prinsip-prinsip *Good Cooperative*

Governance (GCG), yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kesetaraan. Penyelarasan ini bertujuan agar koperasi dapat dikelola secara profesional dan berorientasi pada kepentingan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, khususnya para pengurus, pengawas, dan manajer koperasi, agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Penguatan kapasitas ini mencakup aspek manajerial, kepemimpinan, dan pemahaman terhadap dinamika koperasi di era modern.

Dengan mengintegrasikan pendekatan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia, kegiatan PKM ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya koperasi yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan. Secara lebih luas, kegiatan ini juga mendukung agenda pemerintah daerah dalam mendorong revitalisasi koperasi sebagai sokoguru perekonomian rakyat di Kabupaten Sukabumi.

b. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dimulai dengan koordinasi internal antara tim pelaksana dan identifikasi awal terhadap kebutuhan mitra koperasi yang akan menjadi sasaran kegiatan pengabdian. Pada tahap ini, tim melakukan komunikasi yang mendalam dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Sukabumi sebagai mitra utama untuk memastikan bahwa desain kegiatan sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan kelembagaan koperasi setempat.

Secara spesifik, proses persiapan meliputi:

- a) Sinkronisasi konsep kegiatan dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, yang mencakup:
 - Penyamaan pandangan mengenai tujuan workshop dan pendampingan kelembagaan koperasi;
 - Penetapan mekanisme pelaksanaan kegiatan, yang meliputi metode workshop, teknik pendampingan, serta rencana pemantauan;
 - Penyusunan agenda dan materi teknis pelatihan yang relevan dengan kebutuhan lapangan;
 - Identifikasi kebutuhan peserta koperasi di Kabupaten Sukabumi, baik dari aspek kelembagaan, pemahaman prinsip *good governance*, maupun tantangan dalam pengelolaan koperasi secara umum.

- b) Koordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi dalam merumuskan fokus kegiatan yang berorientasi pada penguatan tata kelola kelembagaan koperasi, termasuk penyusunan regulasi internal yang bersifat partisipatif dan responsif terhadap perubahan lingkungan koperasi.
- c) Persiapan administratif dan teknis, yang mencakup penyusunan instrumen survei untuk menilai kebutuhan koperasi, pengumpulan data koperasi sasaran, serta pengembangan modul pelatihan dan bahan pendampingan yang disesuaikan dengan hasil identifikasi lapangan.

Pada tahap ini, juga dilakukan analisis terhadap berbagai permasalahan kelembagaan yang sering dihadapi oleh koperasi, khususnya terkait dengan implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota. Berbeda dengan pendekatan dalam beberapa studi sebelumnya (Cahyani et al., 2025), kegiatan ini lebih mengutamakan pendekatan kolaboratif dan partisipatif yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mitra, bukan hanya berdasarkan teori kelembagaan semata.

Sehingga keterbaruan dari kegiatan pengabdian ini terletak pada integrasi antara analisis kebutuhan berbasis lapangan dan penguatan kelembagaan koperasi secara menyeluruh, melalui kolaborasi antara akademisi dan pihak pemerintah lokal. Pendekatan ini berpotensi menjadi model yang dapat diterapkan untuk memperkuat koperasi di wilayah lain.

c. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan program pengabdian diawali dengan kegiatan pembukaan oleh pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, yang dilanjutkan oleh penyampaian materi utama oleh tim pengabdian, yang berperan sebagai fasilitator utama dalam keseluruhan rangkaian kegiatan. Inti dari pelaksanaan difokuskan pada pelatihan melalui *workshop* serta pendampingan kelembagaan koperasi yang menasar para pengurus dan pengawas koperasi sebagai peserta utama. Materi *workshop* dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip *Good Cooperative Governance*, khususnya terkait manajemen anggota koperasi, manajemen ekuitas simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi dalam aspek pencatatan, pelaporan dan pengelolaan, manajemen sisa hasil usaha (SHU) Koperasi,

Manajemen Simpanan dan Pinjaman dalam koperasi, penataan kelembagaan koperasi, tentang status hukum kelembagaan koperasi, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan profesionalisme dalam tata kelola koperasi.



Gambar 1. Penyampaian Materi dalam Workshop dan Pendampingan

Pendekatan ini mengintegrasikan teori manajemen koperasi dengan kebutuhan praktis di lapangan, melalui metode kolaboratif yang melibatkan pengurus koperasi secara langsung dalam proses peningkatan kualitas kelembagaan dan operasional koperasi, yang disesuaikan dengan regulasi serta tantangan spesifik di daerah. Pendekatan ini berpotensi menjadi model replikasi bagi penguatan koperasi di wilayah lain.



Gambar 2. Diskusi dalam Workshop dan Pendampingan

Workshop dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, memadukan metode ceramah interaktif, studi kasus, dan diskusi kelompok, sehingga peserta tidak hanya menerima informasi tetapi juga aktif berkontribusi dalam proses pembelajaran. Dalam rangka memperdalam pemahaman dan menyesuaikan materi dengan konteks lokal, diselenggarakan pula sesi diskusi antara peserta dan tim pengabdian yang berfungsi sebagai forum untuk mengidentifikasi tantangan nyata serta merumuskan solusi kelembagaan koperasi yang berbasis kebutuhan riil lapangan. Dalam sesi diskusi ini, penulis bersama peserta membahas elemen-elemen penting dari tata kelola koperasi yang efektif.

Ditekankan bahwa koperasi yang baik harus memiliki beberapa elemen kunci, antara lain:

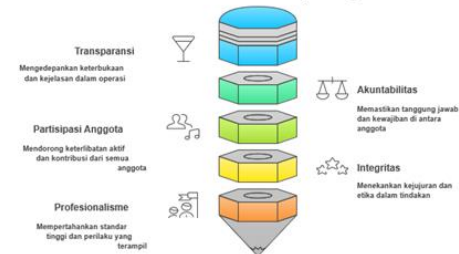
Elemen Tata Kelola Koperasi yang Efektif



Gambar 3. Elemen Tata Kelola Koperasi Yang Efektif

Selain itu, diskusi juga mencakup pilar-pilar tata kelola koperasi yang baik, yang meliputi:

Pilar Tata Kelola yang Baik



Gambar 4. Pilar Tata Kelola Koperasi yang Baik

Selain itu juga, dalam diskusi ini juga dibahas tentang komponen pengelolaan koperasi yang efektif, yang meliputi:



Gambar 5. Komponen Pengelolaan Koperasi yang Efektif

Sehingga secara keseluruhan, pengelolaan koperasi yang baik tidak hanya mengandalkan pengurus yang kompeten, tetapi juga kebijakan yang jelas dan terukur dalam hal akuntansi, manajemen utang, dan aset. Semua aspek ini saling berhubungan dan sangat mempengaruhi kesuksesan koperasi.

Kemudian kegiatan ini dilanjut dengan sesi interaksi tanya jawab, dimana pada Sesi ini membahas pentingnya membangun kerangka akuntansi yang kuat bagi koperasi, dengan

menekankan pada transparansi laporan keuangan, pembukuan yang teliti, audit rutin, dan penerapan standar pelaporan keuangan yang konsisten.



Gambar 6. Interaksi antara Pemateri dan Peserta Workshop

Selain itu, dijelaskan pula fondasi kebijakan akuntansi yang mendukung pengambilan keputusan keuangan yang tepat, transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta akuntabilitas.

Peserta juga diajak memahami proses mitigasi verifikasi keuangan melalui pencatatan transaksi yang rapi, penerapan standar pelaporan, audit berkala, dan penyusunan laporan yang transparan.



Gambar 7. Proses Mitigasi Verifikasi Keuangan

Terakhir, disampaikan strategi manajemen aset komprehensif yang mencakup optimalisasi penggunaan, inventarisasi berkala, pengamanan, serta penilaian dan pemeliharaan aset untuk menjaga keberlanjutan operasional koperasi.



Gambar 8. Strategi Manajemen Aset Komprehensif

Selanjutnya dalam kegiatan pendampingan pemateri melakukan pemahaman kepada peserta tentang praktek keuangan koperasi yang meliputi:

- 1) Manajemen keuangan, strategi untuk praktik keuangan yang baik

- 2) Laporan keuangan, membuat laporan keuangan sederhana
- 3) Kebijakan akuntansi, menyusun kebijakan akuntansi
- 4) Analisis utang, menganalisis manajemen utang
- 5) Analisis aset, menganalisis manajemen aset



Gambar 9. Memahami Praktek Keuangan Koperasi

Dalam akhir kegiatan ini peserta diberikan simulasi dan pelatihan tentang:

- 1) Laporan Keuangan, Membuat laporan keuangan sederhana
- 2) Analisis, Melakukan analisis terhadap manajemen utang dan aset
- 3) Kebijakan, menyusun kebijakan akuntansi dan manajemen keuangan.

Bimbingan dan pendampingan kepada pengurus Koperasi untuk membuat laporan keuangan sederhana serta melakukan analisis terhadap manajemen utang dan aset menggunakan studi kasus nyata koperasi. Sesi ini juga akan membantu peserta untuk menyusun kebijakan akuntansi dan manajemen keuangan yang sesuai dengan praktik tata kelola yang baik.

d. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan serta menilai sejauh mana koperasi mitra mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan. Evaluasi dilakukan melalui observasi langsung, wawancara terstruktur dengan pengurus koperasi, dan penyebaran kuesioner kepada peserta pelatihan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip tata kelola koperasi, serta komitmen koperasi untuk menerapkan praktik kelembagaan yang lebih profesional dan partisipatif. Beberapa koperasi juga mulai menerapkan perbaikan dalam mekanisme rapat anggota, pelaporan keuangan, dan penyusunan program kerja tahunan.

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi, dilakukan identifikasi kebutuhan pendampingan lanjutan yang difokuskan pada penguatan implementasi prinsip tata kelola koperasi, penyempurnaan sistem pelaporan keuangan, serta peningkatan kapasitas pengurus dalam merancang dan menjalankan program kerja tahunan secara berkelanjutan.

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Kegiatan Pendampingan Tata Kelola Koperasi

Aspek yang Dinilai	Kondisi Sebelum Pendampingan	Kondisi Setelah Pendampingan
Pemahaman tentang Tata Kelola Koperasi	Umum dan belum terstruktur; sebagian peserta belum memahami prinsip GCG	Pemahaman meningkat; peserta mengenali prinsip transparansi, akuntabilitas
Penyusunan AD/ART dan Regulasi Internal	Banyak koperasi belum menyesuaikan dengan regulasi terbaru	Peserta mampu merevisi/menyusun AD/ART yang sesuai dengan prinsip tata kelola
Laporan Keuangan Koperasi	Laporan keuangan masih sederhana atau tidak tersedia secara rutin	Peserta mampu menyusun laporan keuangan dasar secara mandiri dan sistematis
Partisipasi Anggota	Partisipasi dalam pengambilan keputusan masih rendah	Mulai dirancang sistem pelibatan anggota dalam forum-forum koperasi
Keterbukaan Informasi Koperasi	Informasi belum sepenuhnya terbuka dan jarang disampaikan secara rutin	Kesadaran akan pentingnya transparansi meningkat; mulai menyusun SOP informasi
Kemampuan Adaptasi Teknologi/Digitalisasi	Belum banyak mengenal konsep digitalisasi koperasi	Memahami potensi digitalisasi dalam pelaporan dan pelayanan koperasi
Koneksi antar Koperasi dan Stakeholder	Minim interaksi antar koperasi maupun dengan Dinas	Terjalin komunikasi awal dan kesepakatan untuk membentuk forum bersama

5. Diskusi

Pengabdian yang kami lakukan lebih menekankan pada penguatan tata kelola kelembagaan koperasi secara sistemik dan aplikatif, sedangkan pengabdian yang dilakukan (Wahyuningsih, 2025) dan (Idrus et al., 2024) cenderung bersifat pengantar dan konseptual. Pendekatan *Participatory Action Research* yang digunakan juga memberikan kelebihan dalam

validasi masalah riil di lapangan dan pendampingan solusi yang relevan. Sehingga keunikan dari kegiatan PKM ini terletak pada pendekatan integratif dan aplikatif yang menggabungkan aspek kelembagaan, keuangan, serta manajerial koperasi secara utuh. Tidak hanya menyampaikan teori tata kelola, kegiatan ini secara langsung membekali pengurus dengan alat praktis dan langkah-langkah strategis, seperti model mitigasi verifikasi keuangan, strategi manajemen aset koperasi, dan panduan kerangka akuntansi koperasi yang jarang disentuh dalam pelatihan koperasi konvensional. Hal ini memberikan dampak konkret pada peningkatan kapasitas koperasi mitra, bukan hanya dari sisi administratif, tetapi juga pada pembentukan budaya tata kelola yang sehat.



Gambar 10. Foto Bersama Setelah Kegiatan Workshop dan Pendampingan

6. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk workshop dan pendampingan berhasil meningkatkan pemahaman para peserta yang terdiri dari pengurus koperasi serta pegawai Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sukabumi terhadap prinsip-prinsip tata kelola koperasi yang baik. Peserta menunjukkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan sederhana, merumuskan AD/ART yang lebih tertata, serta menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam kelembagaan koperasi. Capaian ini mencerminkan peningkatan kapasitas manajerial dan partisipatif koperasi, yang tidak hanya berdampak pada tata kelola internal, tetapi juga membuka peluang penerapan sistem yang lebih profesional, modern, dan adaptif terhadap tantangan di era digital.

Kegiatan ini memberikan implikasi strategis dalam mendukung transformasi kelembagaan koperasi menjadi entitas ekonomi yang lebih kompetitif. Penguatan kapasitas ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan koperasi di masa depan, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem koperasi yang inovatif dan berbasis prinsip Good Cooperative Governance (GCG).

Sebagai rekomendasi kebijakan, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sukabumi diharapkan

dapat: (1) menyusun program pelatihan berkelanjutan yang fokus pada GCG; (2) membentuk sistem monitoring dan evaluasi tata kelola koperasi secara periodik; (3) mengembangkan platform digital untuk pelaporan dan pendampingan koperasi; serta (4) memfasilitasi forum kolaborasi antar koperasi untuk berbagi praktik baik.

Adapun bagi peneliti atau pelaksana ke depan, disarankan untuk: (1) melakukan kajian longitudinal guna mengukur dampak jangka panjang kegiatan terhadap kinerja koperasi; (2) mengembangkan modul pelatihan berbasis digital serta studi kasus lokal yang relevan; dan (3) melibatkan koperasi binaan dalam penelitian-aksi (action research) tahap lanjut guna memperkuat keberlanjutan dan efektivitas program pengabdian.

7. Persembahan

Penulis mengucapkan terima kasih pada Bapak Sigit Widarmadi, A.Md., S.E, selaku kepala dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Sukabumi yang memberikan kesempatan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bentuk pemberian materi mengenai Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi dalam Mewujudkan Koperasi Modern, Profesional, dan Berdaya Saing.

Kepada Para Pengurus atau pengelola Koperasi yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan workshop dan pendampingan ini serta kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi atas bimbingan dan dukungannya dalam menyelesaikan kegiatan ini. dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi bagi peserta maupun masyarakat secara luas.

8. Referensi

- A. Syafira, I. (2020). Manajemen ekuitas pada koperasi syariah. *Eprints UMSIDA*. Retrieved from <http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/6750>
- Budiyono, T. B., & Indah, C. M. (2018). Tatakelola koperasi di Salatiga. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 257–266. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.257-266>
- Cahyani, D., Ridha, M., Huda, K., & Mubarak, A. (2025). Peningkatan ekonomi keluarga melalui pelatihan bisnis jamu tradisional dengan pendekatan PAR dan capacity building di Mojogebang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5(2), 1–14. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i1.1254>

- Deni, A., & Ruswandi, W. (2025). Pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan Sukabumi: Identifikasi tantangan dan optimalisasi peluang melalui fokus group discussion (FGD). *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5(1). <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i1.1275>
- Elya Dasuki, R. (2023). Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan bagi pengurus koperasi di Jawa Barat. *E-Coops-Day*, 4(1), 63–74. <https://doi.org/10.32670/ecoopsday.v4i1.3114>
- Idrus, S. H., Azizah, N., Candra, R., & Ningtyas, P. (2024). Pendampingan tata kelola administrasi usaha mikro dan kecil di Kelurahan Anawai Kota Kendari. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(6), 4–9. <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.960>
- Setiawan, I., & Pangestu, J. (2021). Tata kelola dan keanggotaan koperasi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 2(2), 145–151. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v2i2.285>
- Sudarso, A., Handiman, U. T., Mangiring, H., Simarmata, P., Indonesia, P. B., Sudarmanto, E., & Tangerang, U. M. (2021). *Manajemen koperasi*. Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- Wahyuningsih, E. (2025). Pelatihan penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi modern sektor pangan di Pekanbaru Provinsi Riau. *E-Coops-Day/Jurnal Ilmiah Abdimas*, 6(1), 1–23.
- Yewang, M. U. K. (2022). Kewajiban dan hak anggota koperasi. *Journal Economic Education, Business and Accounting*, 1(2), 55–59. <https://doi.org/10.35508/jeeba.v1i2.8230>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).